



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105061980



BBPP KETINDAN 2022

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018 SEMESTER II TAHUN 2022

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan

Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022



Jl. Ketindan No. 1 Lawang Malang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Januari 2023

Kepala BPP Ketindan,

Ir. Sunardi Noor, M.Si

NIP 196401221994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan.....	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.....	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
A.3. Basis Akuntansi.....	14
A.4. Dasar Pengukuran.....	14
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	23
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	24
B.2. Belanja.....	25
B.3. Belanja Pegawai.....	26
B.4. Belanja Barang.....	27
B.5. Belanja Modal.....	28
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	29
B.5.2. Belanja Modal Jaringan.....	30
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	31
C.1. Aset Lancar.....	31
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	31
C.1.2. Piutang Bukan Pajak.....	31
C.1.3. Persediaan.....	31
C.2. Aset Tetap.....	32
C.2.1. Tanah.....	32
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	32
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	33
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	33
C.2.5. Aset Tetap Lainnya.....	33
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	34
C.3. Aset Lainnya.....	34
C.3.1. Aset Lain-lain.....	34
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	35
C.4. Kewajiban Jangka Pendek.....	35
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga.....	35
C.4.2. Uang Muka dari KPPN.....	36
C.5. Ekuitas.....	36

C.5.1. Ekuitas.....	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	37
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	37
D.2. Beban Pegawai.....	38
D.3. Beban Persediaan.....	40
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	40
D.5. Beban Pemeliharaan.....	43
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	43
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.....	45
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	45
D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	48
E.1. Ekuitas Awal.....	48
E.2. Surplus/Defisit-LO.....	48
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	48
E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	48
E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	48
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	49
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL).....	49
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	49
E.5. Ekuitas Akhir.....	50
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	51
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	51
F.2. BMN yang Disewakan kepada Pihak Ketiga.....	51
F.3. Program Prioritas Nasional.....	51
F.4. Akun Covid-19.....	51
F.5. Jurnal Penyesuaian.....	51
F.6. Kronologi Revisi Anggaran.....	52
F.7. Setoran Pengembalian dari Pegawai.....	53
F.8. Rekening Pemerintah.....	53
F.9. Selisih laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Telaah Laporan Keuangan
Lampiran II	:	Laporan Keuangan
Lampiran III	:	Surat Hasil Rekonsiliasi
Lampiran IV	:	Memo Jurnal Penyesuaian
Lampiran V	:	Laporan Kuasa Pengguna Barang
Lampiran VI	:	Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Aset dan GLP
Lampiran VII	:	Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan
Lampiran VIII	:	BAST BMN
Lampiran IX	:	SK Penghapusan BMN
Lampiran X	:	Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Pengeluaran
Lampiran XI	:	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Periode Semester II Tahun 2017
Lampiran XII	:	Pengembalian Belanja 2022
Lampiran XIII	:	Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Penerimaan
Lampiran XIV	:	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Periode Semester II Tahun 2017
Lampiran XV	:	Rekap PNBK 2022
Lampiran XVI	:	DIPA, Revisi DIPA dan POK Semester II Tahun 2017
Lampiran XVII	:	SP2D Sampai Dengan 31 Desember 2017
Lampiran XVIII	:	Persetujuan Kembali atas Pembukaan Rekening
Lampiran XIX	:	SK Penetapan Pejabat
Lampiran XX	:	Hasil Audit Kinerja 2022
Lampiran XXI	:	Catatan Hasil Review Itjen

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, Januari 2023

Kepala BBPP Ketindan,

The image shows a circular official stamp of the Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan (BBPP Ketindan). The stamp contains a central emblem with a stylized plant. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Sumardi Noor, M.Si

NIP 196401221994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.063.635.260,00 atau mencapai 117% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp907.574.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp13.307.097.475,00 atau mencapai 99,68% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.350.318.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp41.663.025.324,00 yang terdiri dari: Aset Lancar (neto) sebesar Rp3.500.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp41.659.525.324,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.704.502,00 dan Rp41.634.320.822,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp944.678.526,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp15.121.627.807,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-14.176.949.281,00. Kegiatan Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp104.190.108,00 dan Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14.072.759.173,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp42.566.461.410,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-14.072.759.173,00, ditambah Korekasi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp-161.343.630,00 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.301.962.215,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp41.634.320.822,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2022			2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	907.574.000	1.063.635.260	117,20	503.038.298
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	907.574.000	1.063.635.260	117,20	503.038.298
B	BELANJA			0	
	BELANJA PEGAWAI	5.790.390.000	5.768.587.421	99,62	5.785.172.589
	BELANJA BARANG	6.985.628.000	6.969.547.124	99,77	14.534.562.112
	BELANJA MODAL	574.300.000	568.962.930	99,07	246.335.500
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	13.350.318.000	13.307.097.475	99,68	20.566.070.201

II. NERACA

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	3.500.000	8.850.000
JUMLAH ASET LANCAR		3.500.000	8.850.000
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	13.890.000.000	13.890.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	18.157.616.745	16.677.008.815
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	31.657.617.820	31.836.888.520
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.837.316.500	1.690.461.500
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	173.451.242	173.451.242
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(24.056.476.983)	(21.701.158.434)
Jumlah Aset Tetap		41.659.525.324	42.566.651.643
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	0	1.277.747.040
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	0	(1.270.479.108)
Jumlah Aset Lainnya		0	7.267.932
Jumlah Aset		41.663.025.324	42.582.769.575
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	15.179.502	16.308.165
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	13.525.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		28.704.502	16.308.165
Jumlah Kewajiban		28.704.502	16.308.165
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	41.634.320.822	42.566.461.410
Jumlah Ekuitas		41.634.320.822	42.566.461.410
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		41.663.025.324	42.582.769.575

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2022 dan 2021

Uraian	Catatan	32 Desember 2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	944.678.526	497.084.598
JUMLAH PENDAPATAN		944.678.526	497.084.598
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.764.482.773	5.789.277.237
Beban Persediaan	D.3.	27.350.000	64.707.000
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.090.403.269	6.902.693.851
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.007.021.994	1.123.810.750
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.623.128.346	6.246.598.225
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	229.969.500	197.686.500
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.379.271.925	2.443.181.009
JUMLAH BEBAN		15.121.627.807	22.767.954.572
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.9	-14.176.949.281	-22.270.869.974
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	59.122.500	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	-1.241.626	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	46.309.234	5.953.700
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		104.190.108	5.953.700
SURPLUS/DEFISIT - LO		-14.072.759.173	-22.264.916.274

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2022 dan 2021

Uraian	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1.	42.566.461.410,00	44.585.449.410,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-14.072.759.173,00	-22.264.916.274,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-161.343.630,00	17.178.090
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	13.301.962.215,00	20.228.750.184,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-932.140.588,00	-2.018.988.000,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	41.634.320.822,00	42.566.461.410,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan adalah satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian yang didirikan untuk mendukung program-program pertanian Indonesia. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menetapkan visi jangka menengah 2020 – 2024, yaitu : “Menjadi lembaga pelatihan terpercaya, terbaik dan centre of excellent untuk mewujudkan SDM Pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing”.

Lembaga pelatihan terpercaya dimaksudkan bahwa BBPP Ketindan ingin menjadi lembaga pelatihan yang dipercaya mampu mencetak alumni pelatihan/purnawidya, sehingga setelah mengikuti pelatihan di BBPP Ketindan akan meningkat kompetensinya. Hal tersebut sesuai dengan janji maklumat layanan BBPP Ketindan “Dijamin kompetensi anda meningkat.” Lembaga Pelatihan terbaik dimaksudkan bahwa BBPP Ketindan ingin menjadi lembaga/balai pelatihan terbaik diantara balai-balai lain baik tingkat nasional maupun internasional. Centre of excellent, maksudnya adalah bahwa BBPP ketindan kedepan ingin menjadi pusat layanan unggulan dibidang pelatihan pertanian. SDM pertanian yang profesional, adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, ketrampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. SDM pertanian yang mandiri, adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggungjawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. SDM pertanian yang berdaya saing, adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan.

Guna mewujudkan visi-visi tersebut, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan 25 kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani yang prima;

2. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kredibel dan akuntabel;
3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ;
4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta berdaya saing;
5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usahatani;
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
8. Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berdaya saing;
9. Memantapkan reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima

Tujuan yang ingin dicapai BBPP Ketindan pada periode 2020 – 2024 sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator “persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” dengan target 60% (tahun 2020) sampai dengan 90% (tahun 2024);
2. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, dengan indikator “tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (skala likert)” dengan target 3,90 (tahun 2020) sampai dengan 3,94 (tahun 2024);
3. Peningkatan reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima, dengan indikator “nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BBPP Ketindan” dengan target 33,25 (tahun 2020) sampai dengan (34,25 (tahun 2024);
4. Pengelolaan anggaran BBPP Ketindan yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator “nilai kinerja anggaran BBPP Ketindan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NOmor 195 Tahun 2018 (aplikasi SMART DJA)”, dengan target 90,00 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi Per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	40.000.000,00	40.000.000,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan Tusi	271.210.000,00	271.210.000,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	176.790.000,00	584.364.000,00
Jumlah Pendapatan	500.000.000,00	907.574.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.305.897.000,00	5.790.390.000,00
Belanja Barang Operasional	2.302.956.000,00	2.458.516.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.146.505.000,00	1.286.019.000,00
Belanja Barang Persediaan	22.000.000,00	22.000.000,00
Belanja Jasa	448.720.000,00	346.658.000,00
Belanja Pemeliharaan	998.753.000,00	1.007.173.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.654.275.000,00	1.635.262.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	390.000.000,00	230.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.300.000,00	247.262.000,00
Belanja Modal Lainnya		179.774.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		147.264.000,00
Jumlah Belanja	13.343.406.000,00	13.350.318.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.063.635.260,00 atau mencapai 117,20% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp907.574.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022

Uraian	2022		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	40.000.000,00	22.022.000,00	55,06
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	59.122.500,00	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	34.316.508,00	285,97
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan Tusi	271.210.000,00	149.625.000,00	55,17
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	584.364.000,00	751.040.018,00	128,52
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Lainnya	0	1.200.000,00	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	703.234,00	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	45.606.000,00	0
Jumlah	907.574.000,00	1.063.635.260,00	117,20

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 111,44% dibandingkan 31 Desember 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	22.022.000,00	55.542.600,00	- 60,35
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	59.122.500,00	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	34.316.508,00	38.281.998,00	- 10,36
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan Tusi	149.625.000,00	207.100.000,00	- 27,75
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	751.040.018,00	195.960.000,00	283,26
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Lainnya	1.200.000,00	200.000,00	500,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	703.234,00	1.615.200,00	- 56,46
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	45.606.000,00	4.338.500,00	951,19
Jumlah	1.063.635.260,00	503.038.298,00	111,44

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp13.307.097.475,00 atau 99,68% dari anggaran belanja sebesar Rp13.350.318.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2022

Uraian	2022		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	5.790.390.000,00	5.769.988.886,00	99,65
Belanja Barang	6.985.628.000,00	6.975.685.224,00	99,86
Belanja Modal	574.300.000,00	568.962.930,00	99,07
Total Belanja Kotor	13.350.318.000,00	13.314.637.040,00	99,73
Pengembalian Belanja	0	7.539.565,00	-
Total Belanja	13.350.318.000,00	13.307.097.475,00	99,68

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar -35,30% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya pegawai yang menjalani mutasi dan memasuki masa purna tugas sehingga belanja pegawai mengalami penurunan.
2. Berkurangnya belanja Penanganan Pandemi COVID 19 sehingga pagu anggaran tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021.
3. Berkurangnya anggaran untuk belanja perjalanan dinas biasa.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Belanja Pegawai	5.768.587.421,00	5.785.172.589,00	- 0,29
Belanja Barang	6.969.547.124,00	14.534.562.112,00	- 52,05
Belanja Modal	568.962.930,00	246.335.500,00	130,97
Total Belanja	13.307.097.475,00	20.566.070.201,00	- 35,30

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.768.587.421,00 dan Rp5.785.172.589,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar - 0,29% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dua orang pegawai yang memasuki masa purna tugas yaitu a.n Agus Sukmadjaja dan Munanto Haris.
2. Satu orang pegawai mengalami mutasi keluar dan masuk a.n Saptini Mukti Rahajeng.
3. Dua orang pegawai mengalami mutasi keluar a.n Deden Harmedi dan Ridwan Wardiana
4. Penambahan 3 CPNS baru a.n Nur Chotimah, Muhammad Adhe Setyawan, Najia Nuriyana.
5. Pengembalian belanja lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yaitu pengembalian belanja tunjangan fungsional widyaiswara yang sedang menempuh tugas belajar.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.769.988.886,00	5.796.222.610,00	- 0,45
Jumlah Belanja Kotor	5.769.988.886,00	5.796.222.610,00	- 0,45
Pengembalian Belanja Pegawai	1.401.465,00	11.050.021,00	- 87,32
Jumlah Belanja	5.768.587.421,00	5.785.172.589,00	- 0,29

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.969.547.124,00 dan Rp14.534.562.112,00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar -52,05% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan anggaran belanja barang operasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Penurunan belanja barang non operasional akibat menurunnya belanja bahan yang merupakan imbas dari berkurangnya jumlah pelatihan. Penurunan belanja barang non operasional ini juga disebabkan oleh dihapusnya akun belanja barang non operasional – penanganan pandemi Covid-19 karena diberlakukannya Tatanan Normal Baru (*New Normal Life*)
3. Penurunan belanja barang persediaan akibat dari menurunnya jumlah pelatihan dan kegiatan di balai.
4. Adanya penurunan belanja jasa TA 2022 terutama dari jenis jasa profesi yang disebabkan oleh penurunan jumlah pelatihan yang cukup signifikan dibandingkan TA 2021.
5. Adanya penurunan belanja pemeliharaan TA 2022 yang disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan TA 2021.
6. Adanya penurunan belanja perjalanan dalam negeri pada tahun 2022 karena tidak diperlukan persyaratan Antigen dan PCR bagi pegawai yang telah divaksinasi COVID dosis ketiga pada saat melakukan perjalanan dinas.
7. Adanya realisasi belanja barang diserahkan kepada masyarakat pada TA 2022 yang pada TA 2021 kegiatan tersebut tidak ada.

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.458.026.317,00	2.496.668.891,00	- 1,55
Belanja Barang Non Operasional	1.283.264.522,00	3.188.697.900,00	- 59,76
Belanja Barang Persediaan	22.000.000,00	66.950.000,00	- 67,14
Belanja Jasa	346.136.445,00	1.214.659.346,00	- 71,50
Belanja Pemeliharaan	1.007.021.994,00	1.123.301.250,00	- 10,35
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.629.266.446,00	6.246.598.225,00	- 73,92
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	229.969.500,00	197.686.500,00	16,33
Jumlah Belanja Kotor	6.975.685.224,00	14.534.562.112,00	- 52,01
Pengembalian Belanja Barang	6.138.100,00	-	-
Jumlah Belanja	6.969.547.124,00	14.534.562.112,00	- 52,05

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp568.962.930,00 dan Rp246.335.500,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 130,97% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang meliputi sofa, laptop, komputer PC dan alat elektronik lainnya.
2. Adanya Belanja Modal Jaringan yang meliputi pemasangan jaringan listrik dan perbaikan saluran air.
3. Adanya belanja modal lainnya berupa pengeboran air.

Perbandingan Belanja Modal
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.107.930,00	246.335.500,00	- 0,50
Belanja Modal Jaringan	146.855.000,00	0	-

Belanja Modal Lainnya	177.000.000,00	0	-
Jumlah Belanja Kotor	568.962.930,00	246.335.500,00	130,97
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	568.962.930,00	246.335.500,00	130,97

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp27.648.000,00 dan Rp133.905.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami penurunan sebesar -0,50% dibandingkan TA 2021. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2022 meliputi *soundsystem*, porporator, laptop, handphone, komputer PC, speaker, scanner, LCD, Wireless, souncard, printer, sofa, dan pemasangan jaringan internet, sedangkan pada TA 2021 belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa printer, LCD Proyektor, Komputer PC dan sepeda.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.107.930,00	246.335.500,00	- 0,50
Jumlah Belanja Kotor	245.107.930,00	246.335.500,00	- 0,50
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	245.107.930,00	246.335.500,00	- 0,50

B.5.2. BELANJA MODAL JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp146.855.000,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2021. Belanja Modal Jaringan pada periode ini adalah penambahan daya listrik untuk proyek *K-Smart* dan perbaikan saluran air.

Perbandingan Belanja Jaringan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.855.000,00	0	0
Jumlah Belanja Kotor	146.855.000,00	0	0
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	146.855.000,00	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.500.000,00 dan Rp8.850.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	3.500.000,00	8,850,000.00
Jumlah	3.500.000,00	8,850,000.00

Persediaan barang konsumsi per 31 Desember 2022 adalah Buku Katalog Pengolahan Hasil II sebanyak 14 buah.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13,890,000,000.00 dan Rp13,890,000,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp18.157.616.745,00 dan Rp16.677.008.815,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	16.677.008.815,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	245.107.930,00
Transfer Masuk	1.058.500.000,00

Penyelesaian Pembangunan Langsung	177.000.000,00
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2022	18.157.616.745,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-15.865.279.268,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2.292.337.477,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa pembelian alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, komputer unit dan peralatan komputer. Transfer masuk dari BPPSDMP berupa alat studio (videotron). Penyelesaian pembangunan langsung berupa sumur pengeboran air yang diperuntukkan proyek K-Smart, sedangkan mutasi kurang tidak ada dalam periode ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp31.657.617.820,00 dan Rp31,836,888,520.00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	31.836.888.520,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	-179.270.700,00
Saldo per 30 September 2022	31.657.617.820,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-7.362.198.776,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	24.295.419.044,00

Mutasi kurang Gedung dan bangunan dikarenakan koreksi pencatatan atas bangunan asrama permanen yang tercatat dalam dua Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 1.008.317.561,00 dan Rp1.690.461.500,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.690.461.500,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	65.105.000,00

Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	81.750.000,00
Reklasifikasi Masuk	65.105.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	65.105.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	1.837.316.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-828.998.939,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.008.317.561,00

Mutasi tambah jalan, irigasi dan jaringan terdiri atas penambahan jaringan listrik untuk *screenhouse* balai. Pencatatan jaringan listrik tersebut juga melalui proses reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk dikarenakan pemasangan satu jaringan tercatat pada dua NUP yang berbeda. Pengembangan nilai aset berasal dari sumur pemboran air untuk proyek *K-Smart*, yang akunnnya tercatat sebagai belanja modal lainnya.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp173,451,242.00 dan Rp173,451,242.00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	173,451,242.00
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2022	173,451,242.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	173,451,242.00

Tidak ada mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya pada periode ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-24.056.476.983,00 dan Rp-21.701.158.434,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	18.157.616.745,00	-15.865.279.268,00	2.292.337.477,00
2.	Gedung dan Bangunan	31.657.617.820,00	-7.362.198.776,00	24.295.419.044,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.837.316.500,00	-828.998.939,00	1.008.317.561,00
4.	Aset Tetap Lainnya	173.451.242,00	0	173.451.242,00
	Total	51.826.002.307,00	-24.056.476.983,00	27.769.525.324,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.277.747.040,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.277.747.040,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	1.277.747.040,00
Saldo per 30 September 2022	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2022	0,00
Nilai Buku per 31 September 2021	0,00

Mutasi pengurangan aset lain-lain per 31 Desember 2022 berasal dari penghapusan BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional balai.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.270.479.108,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya ini bersaldo Rp0,00 dikarenakan adanya penghapusan aset BMN yang telah berada dalam kondisi rusak berat.

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.179.502,00 dan Rp16.308.165,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	4.104.648,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	15.179.502,00	12.203.517,00
Jumlah	15.179.502,00	16.308.165,00

Belanja barang yang masih harus dibayar adalah beban langganan listrik *screenhouse* bulan Desember 2022 yang belum dibayar sebesar Rp1.567.068,00, beban langganan listrik asrama dan kantor BBPP Ketindan bulan Desember 2022 sebesar Rp13.483.510,00, dan beban langganan telepon balai bulan Desember 2022 sebesar Rp128.924,00.

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.525.000,00 dan Rp0.00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima di kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas negara tersebut.

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Diterima Dimuka	13.525.000,00	0,00
Jumlah	13.525.000,00	000

Pendapatan Diterima Dimuka berasal dari sewa Gedung dan bangunan oleh KPRI Batih selama tiga tahun dengan persetujuan sewa No. S-12/MK.6/WKN.10/KNL.03/2022 Tanggal 8 Februari 2022.

C.5. EKUITAS

C.5.1. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp41.634.320.822,00 dan Rp42.566.461.410,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp944.678.526,00 dan Rp497.084.598,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	22.022.000,00	55.542.600,00	-60,35
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.791.508,00	38.281.998,00	-45,69
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	149.625.000,00	207.100.000,00	-27,75
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	751.040.018,00	195.960.000,00	283,26
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.200.000,00	200.000,00	500,00
Jumlah	944.678.526,00	497.084.598,00	90,04

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berasal dari penjualan hasil pertanian dan pengolahan hasil laboratorium di balai yang mengalami penurunan akibat berkurangnya lahan pertanian yang kini peruntukkannya untuk proyek K-Smart.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa perolehan atas sewa rumah dinas yang mengalami penurunan dikarenakan mutasi pegawai yang sebelumnya menyewa rumah dinas serta sewa gedung dan bangunan oleh KPRI Batih.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi berasal dari penggunaan sarana dan prasarana balai seperti ruang kelas, aula, sound system, asrama dan guest house yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya

4. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah Pendapatan dari Pelatihan Kerjasama Badan Litbang Kementerian Pertanian. Jumlah Kerjasama pelatihan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
5. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya berasal dari jasa permagangan dan penelitian serta kunjungan wisata.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.764.482.773,00 dan Rp5.789.277.237,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.840.033.860,00	3.963.939.000,00	- 3,13
Beban Pembulatan Gaji PNS	56.216,00	55.105,00	2,02
Beban Tunj. Anak PNS	98.142.928,00	101.800.422,00	- 3,59
Beban Tunj. Beras PNS	229.498.980,00	242.462.160,00	- 5,35
Beban Tunj. Fungsional PNS	564.702.000,00	426.410.000,00	32,43
Beban Tunj. PPh PNS	35.311.445,00	25.212.280,00	40,06
Beban Tunj. Struktural PNS	39.130.000,00	43.240.000,00	- 9,51
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	319.037.344,00	332.850.270,00	- 4,15
Beban Tunjangan Umum PNS	87.075.000,00	92.210.000,00	- 5,57
Beban Uang Makan PNS	551.495.000,00	561.098.000,00	- 1,71
Jumlah	5.764.482.773,00	5.789.277.237,00	- 0,43

1. Beban Pembulatan Gaji PNS, Beban Tunjangan Fungsional PNS, Beban Tunjangan PPh PNS dan Beban Tunjangan Beras PNS mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penambahan tiga CPNS.

2. Beban Gaji Pokok PNS, Beban Tunjangan Anak PNS, Beban Tunjangan Suami/Istri PNS dan Beban Tunjangan Umum PNS mengalami penurunan dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi.
3. Beban Tunjangan Struktural PNS mengalami penurunan yang disebabkan oleh perubahan dari jabatan Struktural Eselon III dan IV mengalami transformasi menjadi Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 301/KPTS/KP.230/A/5/2020 Tentang Pemberhentian, pemnindahan, pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup BPPSDMP.
4. Beban Uang Makan PNS mengalami penurunan yang disebabkan oleh jumlah hari libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2021 sehingga berpengaruh terhadap uang makan yang diterima kepada pegawai.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.27.350.000,00 dan 64.707.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	-	36,607,000.00	0
Beban Persediaan konsumsi	27.350.000,00	28,100,000.00	-2,67
Jumlah	27.350.000,00	64,707,000.00	-2.67

1. Beban Persediaan Bahan Baku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena pada periode ini tidak ada anggaran untuk Persediaan Barang Penanganan Pandemi Covid 19.
2. Beban Persediaan Konsumsi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan penghematan balai terkait ketersediaan anggaran.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.090.403.269,00 dan Rp6.902.693.851,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1.225.057.522,00	1.333.586.775,00	- 8,14
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.679.988.725,00	- 100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	47.407.000,00	131.922.400,00	- 64,06
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	119.143.200,00	232.091.045,00	- 48,67
Beban Barang Operasional Lainnya	1.107.429.856,00	1.060.371.264,00	4,44
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	83.424.000,00	84.279.000,00	- 1,01
Beban Honor Output Kegiatan	10.800.000,00	43.200.000,00	- 75,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.688.000,00	562.992.500,00	- 98,10
Beban Jasa Lainnya	79.920.000,00	115.600.000,00	- 30,87
Beban Jasa Profesi	33.000.000,00	326.580.000,00	- 89,90
Beban Keperluan Perkantoran	1.146.865.261,00	1.113.507.782,00	3,00
Beban Langganan Listrik	159.025.876,00	137.057.054,00	16,03
Beban Langganan Telepon	1.928.554,00	3.447.506,00	- 44,06
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.164.000,00	6.419.800,00	- 81,87
Beban Sewa	64.550.000,00	71.650.000,00	- 9,91
Jumlah	4.090.403.269,00	6.902.693.851,00	- 40,74

1. Beban Bahan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan penurunan anggaran pelatihan di balai seperti ATK, fotocopy dan pelaporan.
2. Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 menurun drastis dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada anggaran untuk periode ini.

3. Beban Barang Non Operasional Lainnya mengalami penurunan signifikan yang disebabkan oleh penurunan jumlah pelatihan sehingga berimbas pada berkurangnya belanja untuk P3K dan perlengkapan penunjang lainnya untuk keperluan pelatihan.
4. Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dikarenakan penurunan kebutuhan balai untuk penambah daya tahan tubuh dan vitamin dalam upaya menangani Pandemi COVID-19, sejak diberlakukannya vaksin COVID-19 yang ketiga.
5. Beban Barang Operasional Lainnya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan anggaran untuk operasional lahan praktek, instalasi laboratorium dan perkantoran.
6. Beban Honor Operasional Satuan Kerja mengalami penurunan dikarenakan pengelola anggaran pada Tahun 2022 sudah menjadi Fungsional tertentu sehingga honor Operasional Satker diberikan sesuai aturan yang berlaku.
7. Beban Honor Output Kegiatan berupa honor panitia mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dikarenakan adanya berkurangnya pelaksanaan pelatihan di luar Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
8. Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dikarenakan pada periode ini, kebutuhan akan rapid test berkurang sejak diberlakukan vaksinasi COVID-19 yang ketiga sebagai persyaratan perjalanan.
9. Beban Jasa Profesi mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dikarenakan berkurangnya jumlah pelatihan yang berpengaruh terhadap menurunnya realisasi honor penceramah dan pengajar eksternal.
10. Beban Keperluan Perkantoran mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya kegiatan operasional perkantoran dibandingkan tahun sebelumnya yang masih memberlakukan *Work From Home (WFH)*.
11. Beban Langganan Listrik mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan terdapat penambahan daya listrik untuk screen house balai.

12. Beban Langganan Telepon mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya penurunan penggunaan telepon dan beralih pada jaringan internet.
13. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat mengalami penurunan dikarenakan penurunan jumlah pengiriman Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) kepada peserta.
14. Beban Sewa mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan menurunnya sewa kendaraan sehubungan dengan berkurangnya pelatihan yang dilaksanakan di balai.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.007.021.994,00 dan R1.123.810.750,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	508.280.000,00	596.578.000,00	- 14,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	461.555.994,00	476.324.000,00	- 3,10
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	37.186.000,00	50.908.750,00	- 26,96
Jumlah	1.007.021.994,00	1.123.810.750,00	- 10,39

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan berkurangnya anggaran untuk pemeliharaan Gedung dan bangunan pada periode ini.
2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan meningkatnya kegiatan operasional di balai.

3. Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dikarenakan sudah tidak berlakunya ketentuan bekerja dari rumah (WFH).

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.084.834.220,00 dan Rp4.941.825.438,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.139.940.962,00	751.015.913,00	51,79
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4.158.056.940,00	- 100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	334.867.384,00	283.440.372,00	18,14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	148.320.000,00	1.054.085.000,00	- 85,93
Jumlah	1.623.128.346,00	6.246.598.225,00	- 74,02

1. Beban perjalanan dinas Biasa mengalami kenaikan dibanding tahun lalu karena kegiatan pelatihan mulai berjalan dan dilaksanakan di luar balai.
2. Beban Perjalanan Dinas – penanganan pandemi COVID-19 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada anggaran PC PEN yang diperuntukkan kegiatan pelatihan Tematik bagi aparatur dan non aparatur dan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di beberapa lokasi di luar Balai antara lain di Provinsi Jawa Timur, Bali dan NTB.
3. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota mengalami peningkatan dibanding dengan tahun anggaran yang lalu, hal ini disebabkan oleh

meningkatnya kegiatan di balai dibandingkan tahun sebelumnya yang masih didominasi bekerja dari rumah (WFH).

4. Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota menurun dibanding dengan tahun anggaran yang lalu dikarenakan berkurangnya pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai sehingga berdampak pada menurunnya belanja perjalanan peserta.

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp229.969.500,00 dan Rp197.686.500,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	229.969.500,00	197,686,500.00	16,33
Jumlah	229.969.500,00	197,686,500.00	16,33

Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat berupa printer, mesin pemotong daging dan sebagainya yang didistribusikan ke P4S pada bulan Juli 2022.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.144.519.387,00 dan Rp1.295.205.201,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.599.280.859,00	1.602.866.271,00	- 0,22
Beban Penyusutan Irigasi	26.565.066,00	26.565.066,00	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	49.354.222,00	102.996.222,00	- 52,08
Beban Penyusutan Jaringan	22.884.329,00	19.105.388,00	19,78
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	6.026.306,00	13.055.280,00	- 53,84
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	675.161.143,00	678.592.782,00	- 0,51
Jumlah	2.379.271.925,00	2.443.181.009,00	- 2,62

1. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan nilai Gedung bangunan semakin berkurang.
2. Beban Penyusutan Irigasi mengalami tidak mengalami kenaikan dibanding tahun lalu.
3. Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan mengalami penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan adanya penurunan nilai BMN.
4. Beban Penyusutan Jaringan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan terdapat penambahan jaringan pada periode ini.
5. Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah mengalami penurunan terkait dengan semakin menurunnya asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.
6. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan adanya penurunan nilai BMN.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	59.122.500,00	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	- 1.241.626,00	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	45.606.000,00	4.338.500,00	951,19
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	703.234,00	1.615.200,00	- 56,46
Jumlah	104.190.108,00	5.953.700,00	1.650,01

1. Terdapat kenaikan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dibandingkan tahun sebelumnya yang berasal dari penjualan hasil lelang atas peralatan dan mesin.
2. Terdapat beban pelepasan aset non lancar yang berasal dari nilai buku atas aset lain-lain yang telah dihapuskan.
3. Terdapat kenaikan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu yang berasal dari setoran PPK dan PPSPM yang telah beralih tugas menjadi fungsional khusus senilai Rp7.506.000,00 serta serta pengembalian pembayaran konsumsi pelatihan aparatur senilai Rp6.750.000,00, pelatihan nonaparatur senilai Rp9.000.000,00, pengembalian pembayaran STTPL sebesar Rp19.800.000,00 dan pembayaran transport bandara sebesar Rp2.550.000,00
4. Terdapat kenaikan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu berupa pengembalian uang makan pegawai yang telah mendapatkan surat tugas belajar senilai Rp703.000,00 dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL yang mengalami kenaikan gaji dan tunjangan senilai Rp234,00..

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.566.461.410,00 dan Rp44.585.449.410,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp-14.072.759.173,00 dan Rp-22.264.916.274,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-161.343.630,00 dan Rp17.178.090,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-161.343.630,00 dan Rp17.178.090,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Gedung dan Bangunan	-179.270.700,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.927.070,00
Jumlah Koreksi	-161.343.630,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 13.301.962.215,00 dan Rp20.228.750.184,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022

Transaksi Antar Entitas	Per 31 Desember 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.307.097.475,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.063.635.260,00
Transfer Masuk	1.058.500.000,00
Jumlah	13.301.962.215,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp1.063.635.260,00 sedangkan DKEL sebesar Rp13.307.097.475,00

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.058.500.000,00 berupa videotron yang berasal dari BPPSDMP Kementerian Pertanian.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp41.634.320.822,00 dan Rp42.566.461.410,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. BMN YANG DISEWAKAN KEPADA PIHAK KETIGA

Terdapat BMN yang disewakan kepada KPRI Batih dengan Surat Persetujuan Sewa No. S-12/MK.6/WKN.10/KNL.03/2022 Tanggal 8 Februari 2022 untuk masa 3 tahun senilai Rp19.476.000,00.

F.3. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Terdapat tiga program prioritas nasional di BBPP Ketindan meliputi:

1. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dengan kode output SCC. Pagu program ini sebesar Rp2.074.481.000,00 dan sudah terealisasi 99,6%, yaitu sebesar Rp2.066.085.810,00. Target yang ingin dilayani sebesar 652 orang dan sudah terealisasi 100% yaitu 652 orang.
2. Sertifikasi Profesi dan SDM dengan kode output PDI. Pagu program ini sebesar Rp255.318.000,00 dan sudah terealisasi 99,96%, yaitu sebesar Rp255.318.000,00. Target yang ingin dilayani sebanyak 120 orang dan sudah terealisasi 100% yaitu 120 orang.
3. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dengan kode output QDB. Pagu program ini sebesar Rp331.800.000,00 dan sudah terealisasi 99,98%, yaitu sebesar Rp331.736.500,00. Target yang ingin dilayani sebanyak 13 lembaga dan sudah terealisasi 100% yaitu 13 lembaga.

F.4. AKUN COVID-19

Terdapat 2 akun Covid-19 yaitu akun 522192 dan 521131. Akun 522192 adalah Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 yang peruntukannya untuk Rapid Tes dll dengan pagu senilai Rp10.688.000,00 dan telah terealisasi 100% sebesar Rp10.688.000,00. Akun 521131 adalah Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 yang peruntukannya untuk pembelian Suplemen, Handsanitizer, vitamin dan lain-lain dengan pagu sebesar Rp119.156.000,00 dan telah terealisasi 99,99% sebesar Rp119.143.200,00.

F.5. JURNAL PENYESUAIAN

Terdapat beberapa jurnal penyesuaian khusus dengan memo penyesuaian dan bukti terlampir yaitu:

1. Jurnal pembalik atas listrik bulan Desember 2021 sebesar Rp12.024.702,00.
2. Jurnal pembalik atas telepon bulan Desember 2021 sebesar Rp178.815,00.
3. Jurnal pembalik atas belanja gaji pokok PNS tahun 2021 sebesar Rp1.902.000,00.

4. per 27 September 2022 berupa koreksi atas kelebihan jurnal balik belanja gaji pokok PNS senilai Rp1.800,00.
5. Gaji Pokok PNS terdapat selisih senilai Rp. 3.398.100,00 yang disebabkan oleh kenaikan gaji pokok PNS dengan SK terlampir a.n Asep Koswara, Fransisca Lani dan Murdani yang dibayarkan 17 Januari 2022.
6. Tunjangan Suami/istri PNS terdapat selisih senilai Rp. 296.970,00 yang disebabkan oleh kenaikan tunjangan suami /istri PNS dengan SK terlampir a.n Asep Koswara, Fransisca Lani dan Murdani yang dibayarkan 17 Januari 2022.
7. Tunjangan Anak PNS terdapat selisih senilai Rp. 109.578,00 yang disebabkan kenaikan tunjangan suami /istri PNS dengan SK terlampir a.n Asep Koswara, Fransisca Lani dan Murdani yang dibayarkan 17 Januari 2022.
8. Tunjangan fungsional PNS terdapat selisih senilai Rp. 300.000,00 yang disebabkan oleh kenaikan tunjangan fungsional dengan SK terlampir a.n Nining Hariyani yang dibayarkan 17 Januari 2022.
9. Langganan listrik terdapat selisih senilai Rp. 2.788.462,00 yang disebabkan selisih antara penyesuaian listrik bulan Desember 2020 dan belanja listrik bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2022.
10. Langganan telepon terdapat selisih senilai Rp. 120.748,00 yang disebabkan selisih antara penyesuaian telepon bulan Desember 2020 dan belanja telepon bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2022.

F.6. KRONOLOGI REVISI ANGGARAN

KRONOLOGIS REVISI POK 1 ANGGARAN TAHUN 2022

Revisi perubahan judul pelatihan yang semula Pelatihan Tematik Pengembangan Kelembagaan Berbasis Korporasi di Prov. Jatim menjadi Pelatihan Adaptasi dan Mitigasi Pertanian Terhadap Perubahan Iklim

1. KRONOLOGIS REVISI DIPA I ANGGARAN TAHUN 2022 (28 Meret 2022)

Pergeseran anggaran PNBPN yang berasal dari output 1810.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 195.331.000,- ke output 1810.SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dalam rangka Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Penyuluh Tingkat Ahli (PNBP) sebanyak 30 orang sebesar Rp. 195.331.000,-

2. KRONOLOGIS REVISI DIPA II ANGGARAN TAHUN 2022 (18 April 2022)

Revisi halaman III DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan anggaran mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

3. KRONOLOGIS REVISI DIPA III ANGGARAN TAHUN 2022 (18 Mei 2022)

Adanya *automatic adjustment* (AA) *self bloking* anggaran sebesar Rp. 247.352.000,- yang terdiri dari

1. Anggaran sertifikasi bidang pertanian sebesar Rp. 116.352.000,- (AA1 sebesar Rp 96.352.000,- dan AA3 sebesar Rp. 20.000.000,-)

2. Anggaran penguatan kelembagaan P4S dalam rangka AA2 sebesar Rp. 131.000.000,- dengan mengurangi target lembaga yang semula 13 lembaga menjadi 8 lembaga

4. KRONOLOGIS REVISI DIPA IV ANGGARAN TAHUN 2022 (3 Juni 2022)

1. Adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 yang digunakan untuk pendampingan proyek *ENHANCING MILLENNIAL FARMERS' INCOME BY ADOPTING K-SMART FARM TECHNOLOGIES IN INDONESIA*
2. Adanya *automatic adjustment (AA) self bloking* anggaran tahap II sebesar Rp. 80.742.000,- yang terdiri dari
 - Anggaran sertifikasi bidang pertanian sebesar Rp. 24.330.000,-
 - Anggaran pelatihan aparatur sebesar Rp. 29.930.000,-
 - Anggaran pelatihan non aparatur sebesar Rp. 26.482.000,-

5. KRONOLOGIS REVISI DIPA V ANGGARAN TAHUN 2022 (6 Juli 2022)

1. Pergeseran anggaran PNPB dari KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke KRO Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sub komponen Pelatihan bagi Non Aparatur sebesar Rp. 40.918.000,-
2. Adanya penambahan target peserta Pelatihan Bidang pertanian dan Perikanan sub Komponen Pelatihan bagi Non Aparatur yang semula 300 orang menjadi 410 orang dimana ada penambahan pelatihan terkait kerjasama pelatihan dengan BNPT sebanyak 2 angkatan 60 orang dan kerjasama kegiatan Bimtek dengan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebanyak 80 orang.

6. KRONOLOGIS REVISI DIPA VI ANGGARAN TAHUN 2022 (2 September 2022)

1. Adanya penambahan belanja pegawai sebesar Rp. 60.000.000,00.
2. Penyesuaian rencana penarikan DIPA hal III sampai dengan bulan Agustus 2022.

F.7. SETORAN PENGEMBALIAN DARI PEGAWAI

Terdapat setoran pengembalian dari pegawai sebagai berikut:

1. Terdapat setoran pengembalian uang makan pegawai tugas belajar yang dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp. 703.000,-.
2. Terdapat pengembalian kelebihan honorarium PPK Januari s.d Maret 2021 dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai pejabat fungsional keuangan sebesar Rp. 5.256.000,- dan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022.
3. Terdapat pengembalian kelebihan honorarium PPSPM Januari s.d Maret 2021 dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai pejabat fungsional keuangan sebesar Rp. 2.250.000,- dan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022.

F.8. REKENING PEMERINTAH

Rekening bendahara pengeluaran mengalami penggantian menjadi virtual account, yang nomor rekening bendahara yang lama berganti dari nomor rekening 1440011747927 menjadi 8100122396541000 an. BPG Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada PT Bank Mandiri KCP Lawang sesuai surat persetujuan Pembukaan kembali rekening dari KPPN Tipe A1 Jakarta nomor: S-1271/WPB.12/KP.05/2020, Tanggal 29 Juni 2020.

F.9. Selisih Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional

Terdapat selisih Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebagai berikut:

Selisih Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional
per 30 September 2022

Akun	LRA	LO	Selisih
Pendapatan	489.831.001	423.563.118	66.267.883
Belanja Pegawai	4.501.494.263	4.843.741.081	- 342.246.818
Belanja Persediaan	5.000.000	13.850.000	- 8.850.000
Belanja Barang & Jasa	3.060.764.933	3.107.521.416	- 46.756.483
Belanja Pemeliharaan	876.102.791	875.934.791	168.000
Belanja Perjadin	1.084.834.220	1.084.834.220	-
Belanja diserahkan ke Masyarakat	229.969.500	229.969.500	-

1. Selisih pendapatan antara LO dan LRA senilai Rp66.267.883,00 berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp59.122.500,00, Penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar 703.234, Penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp7.506.000,00, Piutang Lainnya dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa rumah dinas Rp1.063.851,00.
2. Selisih Belanja Pegawai antara LO dan LRA senilai Rp-342.246.818,00 berasal dari Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp346.351.466,00 dan jurnal penyesuaian terkait belanja pegawai periode 31 Desember 2021 sebesar Rp4.104.648,00.
3. Selisih Belanja Persediaan antara LO dan LRA senilai Rp-8.850.000,00 berasal dari saldo awal persediaan barang konsumsi periode 1 Januari 2022 .
4. Selisih Belanja Barang dan Jasa antara LO dan LRA senilai Rp-46.756.483,00 berasal dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berupa honor PPNPN bulan September 2022 sebesar Rp58.960.000,00 dan jurnal penyesuaian belanja listrik dan

telepon yang masih harus dibayar periode 31 Desember 2021 sebesar Rp12.203.517,00.

5. Selisih Belanja Pemeliharaan antara LO dan LRA sebesar Rp168.000,00 berasal dari sisa barang persediaan untuk pemeliharaan per 30 September 2022.